

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Gunungsitoli

Kantor Dinas Sosial Kota Gunungsitoli berawal dari pemekaran Kabupaten Nias pada tahun 2009, yang sebelumnya hanya terdiri dari 1 (satu) Kabupaten menjadi 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Selatan. Serta 1 (satu) Kota Madya yaitu Kota Gunungsitoli.

Undang-undang No.25 tahun 2005 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, maka Dinas Sosial Kota Gunungsitoli yang merupakan salah satu SKPD sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Walikota Gunungsitoli No.3 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kantor Dinas Sosial Kota Gunungsitoli Sekretariat membawahi 2 Sub bagian yaitu; Sub bagian Tata Usaha dan Keuangan, Sub bagian Program dan Data. Bidang terdiri dari Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, membawahi 2 (dua) seksi yaitu: Seksi Pemberdayaan Sosial dan Seksi Perlindungan Sosial. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, membawahi 2 (dua) seksi yaitu :Seksi Rehabilitasi Sosial dan Seksi Perlindungan Jaminan Sosial. Dalam perjalannya, Dinas Sosial Kota Gunungsitoli telah dipimpin oleh beberapa Kepala Dinas, dimulai dari awal hingga sekarang. Berikut urutan Kepala Dinas Kota Gunungsitoli:

1. Faoziduhu Telaumbanua
2. Olewata Zebua
3. Soziduhu Lombu
4. Fauduasa Hulu
5. Basrah Zebua
6. Hardi Telaumbanua

7. Meilinda Rostanti Larosa
8. Asieli Zega, SE
9. Everoni Mendrofa, SKM,M.Kes
10. Bonifasius Telaumbanua, SSTP, M.Si

Selanjutnya dalam tugasnya, Kantor Dinas Sosial Kota Gunungsitoli saat ini beralamat di kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli, @e-mail:dinsoskotagunungsitoli@gmail.com kode pos – 22810.

1.1.1 Visi Dan Misi

1. Visi

Pelayanan sosial yang berkualitas dan profesional

2. Misi

- a) Meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)/pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
- b) Membangun kemitraan dengan lembaga kesejahteraan sosial (LKS).
- c) Meningkatkan pelayanan berbasis teknologi
- d) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia dinas sosial kota gunungsitoli dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS).

1.1.2 Deskripsi Informan (*key Informant*)

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil beberapa informan (*key Informant*) untuk diteliti, maka yang menjadi informan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Informan (*Key Informan*)

No	Nama	Jabatan
1	Restuieli Harefa, SST	Kabid Rehabilitas Dinas Sosial Kota Gunungsitoli
2	Howu Howu S. Zebua, SST	Kasubbid Rehabilitas Dinas Sosial Kota Gunungsitoli
3	Leni Oktalina Ndraha, S.Tr., S.Sos	Staf

Sumber data: olahan peneliti 2024

1.2 Hasil Penelitian

Dinas Sosial memiliki peran penting dalam menyosialisasikan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya pelecehan seksual dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegahnya. Melalui program sosialisasi, Dinas Sosial dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melibatkan semua pihak dalam melindungi anak-anak dari potensi risiko pelecehan seksual.

Selain itu, Dinas Sosial juga memiliki peran dalam mengedukasi orangtua, guru, dan pihak-pihak terkait lainnya tentang cara mendeteksi tanda-tanda pelecehan seksual pada anak. Mereka dapat menyelenggarakan pelatihan atau seminar untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar orang dewasa dapat lebih peka terhadap perilaku yang mencurigakan dan mengambil tindakan yang tepat. Dalam hal penanganan kasus pelecehan seksual, Dinas Sosial dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, rumah sakit, dan lembaga kesejahteraan anak. Mereka dapat membantu dalam proses rehabilitasi korban pelecehan seksual dan menyediakan dukungan psikososial yang diperlukan bagi anak-anak yang mengalami trauma.

Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan dan kebijakan terkait perlindungan anak diterapkan dengan baik di berbagai lembaga, termasuk sekolah dan lembaga perawatan anak. Mereka dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan implementasi yang efektif dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Menyosialisasikan Pencegahan dan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak dibawah umur di wilayah Kota Gunungsitoli?

Berdasarkan hasil wawancara kepada Restuieli Harefa, SST sebagai Kabid Rehabilitas dan Howu Howu SS. Zebua, SST. Sebagai Kasubbid Rehabilitas Dinas Sosial pada hari Rabu tanggal 03 Januari

2024, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, peneliti bertanya kepada Restuieli Harefa, SST informan 1 menyatakan bahwa:

“Dinas Sosial di Kota Gunungsitoli memiliki peran sentral dalam menyosialisasikan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat mengenai risiko pelecehan seksual pada anak dan bagaimana melibatkan diri dalam pencegahan. Ini melibatkan penyelenggaraan program-program edukasi dan sosialisasi di tingkat komunitas, termasuk desa-desa dan sekolah-sekolah. Dinas Sosial dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk menyampaikan informasi secara efektif. Mereka dapat mengadakan seminar, lokakarya, dan pertemuan komunitas guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanda-tanda pelecehan seksual pada anak serta cara melaporkannya. Selain itu, pada Dinas Sosial di Kota Gunungsitoli memiliki tanggung jawab untuk membantu dalam penanganan kasus pelecehan seksual. Hal ini dapat memberikan dukungan kepada korban, termasuk layanan psikososial dan konseling. Kolaborasi dengan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, juga dapat menjadi bagian dari upaya penanganan kasus untuk memastikan keadilan bagi korban. Dalam konteks lokal, Dinas Sosial juga dapat berperan dalam memfasilitasi kerjasama antara berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah untuk membentuk jaringan yang solid dalam melindungi anak-anak dari pelecehan seksual. Ini melibatkan koordinasi berbagai program dan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan perlindungan anak di wilayah tersebut.

Berdasarkan informasi dari informan 1, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial di Kota Gunungsitoli memiliki peran sentral dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Mereka bertanggung jawab untuk menyosialisasikan informasi mengenai risiko pelecehan seksual kepada masyarakat setempat dan melibatkan diri dalam kegiatan pencegahan. Dinas Sosial bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk menyampaikan informasi secara efektif melalui program-program edukasi dan sosialisasi di tingkat komunitas. Dalam hal penanganan kasus, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk membantu korban, termasuk menyediakan layanan psikososial dan

konseling. Kolaborasi dengan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, juga menjadi bagian dari upaya penanganan kasus untuk memastikan keadilan bagi korban. Selain itu, Dinas Sosial turut berperan dalam memfasilitasi kerjasama antara berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah. Hal ini bertujuan membentuk jaringan yang solid dalam melindungi anak-anak dari pelecehan seksual, melibatkan koordinasi berbagai program dan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan perlindungan anak di wilayah tersebut. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, peneliti bertanya kepada Bapak Howu Howu SS. Zebua, SST, informan 2 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Dinas Sosial di Kota Gunungsitoli memiliki peran signifikan dalam mengedukasi dan membimbing masyarakat terkait pencegahan dan penanganan pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Mereka bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang jelas dan menyeluruh mengenai risiko pelecehan seksual, serta menyoroti langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh individu dan komunitas untuk melibatkan diri dalam pencegahan. Dalam hal edukasi, Dinas Sosial melakukan upaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada orangtua, guru, dan pihak-pihak terkait lainnya. Ini melibatkan penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti pelatihan, seminar, dan lokakarya. Dengan demikian, mereka dapat memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada para pemangku kepentingan agar dapat mengidentifikasi potensi tanda-tanda pelecehan seksual pada anak dan meresponnya dengan tepat. Dalam hal penanganan kasus, Dinas Sosial bekerja secara kolaboratif dengan instansi terkait seperti kepolisian dan lembaga kesehatan. Kolaborasi ini melibatkan penyediaan bantuan kepada korban, baik secara emosional maupun praktis, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Sosial juga berperan aktif dalam memastikan penerapan kebijakan perlindungan anak di berbagai institusi, termasuk sekolah dan lembaga perawatan anak. Melalui monitoring dan evaluasi rutin, mereka memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan.

Berdasarkan dukungan yang diberikan oleh informan 2, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial di Kota Gunungsitoli memiliki peran yang signifikan dalam edukasi dan pembimbingan masyarakat terkait

pencegahan dan penanganan pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Mereka bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang jelas dan menyeluruh mengenai risiko pelecehan seksual, serta menyoroti langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh individu dan komunitas untuk melibatkan diri dalam pencegahan. Dalam hal edukasi, Dinas Sosial aktif memberikan pemahaman mendalam kepada orangtua, guru, dan pihak-pihak terkait lainnya melalui kegiatan seperti pelatihan, seminar, dan lokakarya. Tujuannya adalah memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada para pemangku kepentingan agar dapat mengidentifikasi tanda-tanda pelecehan seksual pada anak dan meresponnya dengan tepat. Dalam hal penanganan kasus, Dinas Sosial bekerja secara kolaboratif dengan instansi terkait seperti kepolisian dan lembaga kesehatan. Kolaborasi ini melibatkan penyediaan bantuan kepada korban secara emosional dan praktis, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Sosial juga berperan aktif dalam memastikan penerapan kebijakan perlindungan anak di berbagai institusi, termasuk sekolah dan lembaga perawatan anak, melalui monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan implementasi yang efektif dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Begitu juga dengan informan 3, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, peneliti bertanya kepada Ibu Leni Oktalina Ndraha, S.Tr., S.Sos, informan 3 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Dinas Sosial dapat menginisiasi dan mengkoordinasikan program sosialisasi di masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai pencegahan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Program ini dapat mencakup penyuluhan, seminar, dan kegiatan publik lainnya yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang tua, guru, dan masyarakat umum”

2. Bagaimana program Dinas Sosial dalam melakukan tindakan pencegahan maupun penanganan kasus pelecehan seksual pada wilayah Kota Gunungsitoli?

Berdasarkan hasil wawancara kepada Restuieli Harefa, SST sebagai Kabid Rehabilitas dan Howu Howu SS. Zebua, SST. Sebagai Kasubbid Rehabilitas Dinas Sosial pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, peneliti bertanya kepada Restuieli Harefa, SST informan 1 menyatakan bahwa:

“Dinas Sosial di Kota Gunungsitoli telah mengimplementasikan program-program yang holistik untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada wilayah tersebut. Dalam aspek pencegahan, mereka menyelenggarakan kampanye penyuluhan di berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan risiko pelecehan seksual pada anak-anak. Program ini melibatkan seminar, workshop, dan kegiatan komunitas yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang cara mencegah dan mengidentifikasi tanda-tanda pelecehan seksual. Dinas Sosial juga bekerja sama dengan sekolah dan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan pendekatan pencegahan ke dalam kurikulum pendidikan. Ini mencakup pelatihan bagi guru dan staf sekolah untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mendeteksi serta menangani potensi kasus pelecehan seksual pada anak-anak. Dalam hal penanganan kasus, Dinas Sosial bekerja sama erat dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian untuk memberikan pendampingan dan dukungan kepada korban pelecehan seksual. Mereka juga menyediakan layanan konseling dan rehabilitasi untuk membantu korban dalam pemulihan psikologis mereka. Selain itu, Dinas Sosial dapat mendirikan pusat krisis atau tempat aman bagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Pusat ini dapat menyediakan layanan medis, psikososial, dan hukum, serta menjadi tempat bagi korban untuk mendapatkan perlindungan sementara. Program-program ini dijalankan melalui kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah, lembaga kesehatan, dan lembaga pendidikan. Dinas Sosial juga melakukan pemantauan terus-menerus terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak di berbagai sektor, termasuk di lingkungan keluarga dan masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak di Kota Gunungsitoli, serta memberikan respons yang efektif terhadap kasus-kasus pelecehan seksual yang mungkin terjadi”

Berdasarkan informasi dari informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial di Kota Gunungsitoli telah mengimplementasikan program-program holistik untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual di wilayah tersebut. Dalam aspek

pencegahan, mereka mengadakan kampanye penyuluhan di berbagai lapisan masyarakat melalui seminar, workshop, dan kegiatan komunitas. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko pelecehan seksual pada anak-anak. Dinas Sosial juga bekerja sama dengan sekolah dan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan pendekatan pencegahan ke dalam kurikulum pendidikan. Ini termasuk pelatihan bagi guru dan staf sekolah untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mendeteksi serta menangani potensi kasus pelecehan seksual pada anak-anak. Dalam hal penanganan kasus, Dinas Sosial bekerja erat dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, memberikan pendampingan dan dukungan kepada korban pelecehan seksual, serta menyediakan layanan konseling dan rehabilitasi untuk membantu korban dalam pemulihan psikologis. Dinas Sosial juga dapat mendirikan pusat krisis atau tempat aman bagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Pusat ini menyediakan layanan medis, psikososial, dan hukum, serta menjadi tempat bagi korban untuk mendapatkan perlindungan sementara. Program-program ini dijalankan melalui kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah, lembaga kesehatan, dan lembaga pendidikan. Selain itu, Dinas Sosial melakukan pemantauan terus-menerus terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak di berbagai sektor, termasuk di lingkungan keluarga dan masyarakat, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak di Kota Gunungsitoli serta memberikan respons yang efektif terhadap kasus-kasus pelecehan seksual yang mungkin terjadi. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, peneliti bertanya kepada Bapak Howu Howu SS. Zebua, SST, informan 2 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Dinas Sosial di Kota Gunungsitoli telah mengimplementasikan serangkaian program pencegahan dan penanganan pelecehan seksual pada anak yang dirancang untuk mencakup berbagai aspek masyarakat. Dalam hal pencegahan, mereka mengadakan kampanye publik yang melibatkan pemangku kepentingan kunci, seperti orangtua, guru, dan pemuda. Program ini mencakup penyuluhan,

seminar, dan diskusi kelompok untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pencegahan dan cara mengidentifikasi potensi kasus pelecehan seksual. Dinas Sosial juga berfokus pada pendekatan pendidikan, bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan kurikulum yang mempromosikan kesadaran dan keterampilan untuk melindungi anak-anak dari pelecehan seksual. Ini mencakup pelatihan bagi guru dan karyawan sekolah dalam penanganan sensitif kasus-kasus pelecehan seksual. Dalam menghadapi kasus pelecehan seksual, Dinas Sosial bekerja sama dengan lembaga kesehatan dan kepolisian untuk memberikan layanan pendampingan bagi korban. Mereka juga menyusun program rehabilitasi psikososial untuk membantu anak-anak yang terkena dampak pelecehan seksual agar dapat pulih secara emosional dan mental. Dinas Sosial juga menciptakan pusat sumber daya bagi keluarga dan komunitas, tempat di mana orang dapat mengakses informasi, dukungan, dan bantuan. Pusat ini berfungsi sebagai titik pusat bagi pencegahan, identifikasi, dan penanganan kasus pelecehan seksual. Selain itu, Dinas Sosial berkoordinasi dengan organisasi non-pemerintah dan kelompok advokasi yang memiliki kepentingan serupa. Kolaborasi ini memperkuat upaya bersama dalam melindungi anak-anak dan menanggapi secara efektif terhadap kasus-kasus pelecehan seksual di Kota Gunungsitoli”

Berdasarkan dukungan dari informan 2, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial di Kota Gunungsitoli telah melaksanakan serangkaian program pencegahan dan penanganan pelecehan seksual pada anak yang melibatkan berbagai aspek masyarakat. Dalam upaya pencegahan, mereka mengadakan kampanye publik dengan melibatkan pemangku kepentingan kunci seperti orangtua, guru, dan pemuda. Program ini mencakup kegiatan penyuluhan, seminar, dan diskusi kelompok untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pencegahan dan cara mengidentifikasi potensi kasus pelecehan seksual. Dinas Sosial juga fokus pada pendekatan pendidikan dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan kurikulum yang mempromosikan kesadaran dan keterampilan untuk melindungi anak-anak dari pelecehan seksual. Pelatihan khusus diberikan kepada guru dan karyawan sekolah dalam penanganan sensitif kasus-kasus pelecehan seksual. Dalam menghadapi kasus pelecehan seksual, Dinas Sosial bekerja sama dengan lembaga kesehatan dan kepolisian untuk memberikan layanan pendampingan bagi

korban. Mereka juga merancang program rehabilitasi psikososial untuk membantu anak-anak yang terkena dampak pelecehan seksual agar dapat pulih secara emosional dan mental. Pusat sumber daya juga diciptakan sebagai titik pusat bagi pencegahan, identifikasi, dan penanganan kasus pelecehan seksual, memberikan informasi, dukungan, dan bantuan kepada keluarga dan komunitas. Kerjasama erat dengan organisasi non-pemerintah dan kelompok advokasi yang memiliki kepentingan serupa memperkuat upaya bersama dalam melindungi anak-anak dan merespons secara efektif terhadap kasus-kasus pelecehan seksual di Kota Gunungsitoli. Begitu juga dengan informan 3, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, peneliti bertanya kepada Ibu Leni Oktalina Ndraha, S.Tr., S.Sos, informan 3 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Mengadakan kegiatan sosialisasi di sekolah, pusat kesejahteraan anak, dan masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual. Memberikan penyuluhan kepada anak-anak, orang tua, dan guru mengenai tanda-tanda pelecehan, cara melaporkan, dan tindakan preventif”

mengemukakan pentingnya kegiatan sosialisasi sebagai upaya meningkatkan kesadaran mengenai pelecehan seksual di berbagai lapisan masyarakat. Menurut informan, kegiatan sosialisasi perlu dilakukan di berbagai tempat, termasuk di sekolah, pusat kesejahteraan anak, dan masyarakat umum. Selain itu, informan juga menyoroti pentingnya memberikan penyuluhan kepada anak-anak, orang tua, dan guru tentang tanda-tanda pelecehan seksual, cara melaporkannya, dan langkah-langkah preventif yang dapat diambil. Penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai isu pelecehan seksual dan membantu mereka untuk lebih proaktif dalam melindungi diri dan orang lain. Dengan demikian, informan tersebut secara jelas menyatakan dukungan terhadap inisiatif untuk mengurangi dan

mencegah pelecehan seksual melalui pendekatan penyuluhan dan sosialisasi di berbagai tingkatan masyarakat.

3. Untuk mengetahui Peran Dinas Sosial Dalam Menyosialisasikan Pencegahan dan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak dibawah umur di wilayah Kota Gunungsitoli.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Restuieli Harefa, SST sebagai Kabid Rehabilitas dan Howu Howu SS. Zebua, SST. Sebagai Kasubbid Rehabilitas Dinas Sosial pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, peneliti bertanya kepada Restuieli Harefa, SST informan 1 menyatakan bahwa:

“Dinas Sosial memiliki peran krusial dalam menyosialisasikan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur di Kota Gunungsitoli. Mereka bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan cara-cara mengidentifikasi serta melaporkan tindak pelecehan seksual. Dalam penyuluhan, Dinas Sosial dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti sekolah, komunitas, dan organisasi non-pemerintah, guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pelecehan seksual pada anak-anak. Mereka juga dapat mengadakan seminar, workshop, atau kampanye publik untuk menyampaikan informasi tentang tanda-tanda pelecehan seksual dan langkah-langkah preventif yang dapat diambil. Dalam hal penanganan kasus, Dinas Sosial berperan sebagai mediator antara korban, keluarga, dan lembaga penegak hukum. Mereka dapat memberikan dukungan psikososial kepada korban dan keluarganya, serta membantu mereka dalam proses pengaduan dan penyelidikan. Dinas Sosial juga dapat mengoordinasikan upaya rehabilitasi bagi korban pelecehan seksual agar mereka dapat pulih secara fisik dan psikologis. Selain itu, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak di wilayah tersebut diimplementasikan dengan baik. Hal ini melibatkan kerjasama dengan pihak terkait, seperti kepolisian, instansi pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan, guna menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak. Secara keseluruhan, peran Dinas Sosial dalam menyosialisasikan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak di Kota Gunungsitoli”

Berdasarkan pernyataan informan 1, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial memiliki peran krusial dalam menyosialisasikan pencegahan

dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur di Kota Gunungsitoli. Dinas Sosial bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak, cara mengidentifikasi, dan melaporkan tindak pelecehan seksual. Dalam upaya penyuluhan, Dinas Sosial bekerja sama dengan berbagai pihak seperti sekolah, komunitas, dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pelecehan seksual pada anak-anak. Mereka menyelenggarakan seminar, workshop, atau kampanye publik guna menyampaikan informasi tentang tanda-tanda pelecehan seksual dan langkah-langkah preventif yang dapat diambil. Dalam hal penanganan kasus, Dinas Sosial berperan sebagai mediator antara korban, keluarga, dan lembaga penegak hukum. Mereka memberikan dukungan psikososial kepada korban dan keluarganya, serta membantu dalam proses pengaduan dan penyelidikan. Dinas Sosial juga mengoordinasikan upaya rehabilitasi bagi korban pelecehan seksual agar mereka dapat pulih secara fisik dan psikologis. Selain itu, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak di wilayah tersebut diimplementasikan dengan baik. Ini melibatkan kerjasama dengan pihak terkait seperti kepolisian, instansi pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan, guna menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak. Secara keseluruhan, peran Dinas Sosial sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak di Kota Gunungsitoli melalui sosialisasi, pencegahan, dan penanganan kasus pelecehan seksual. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, peneliti bertanya kepada Bapak Howu Howu SS. Zebua, SST, informan 2 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Dinas Sosial memegang peran kunci dalam upaya menyosialisasikan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur di Kota Gunungsitoli. Mereka bertanggung jawab untuk menjadi agen perubahan di masyarakat dengan memberikan informasi yang akurat dan mendalam tentang risiko pelecehan seksual terhadap anak-anak. Melalui

kegiatan penyuluhan, Dinas Sosial dapat menggerakkan inisiatif untuk memberdayakan masyarakat dalam mengidentifikasi perilaku pelecehan seksual dan memahami konsekuensinya. Mereka juga dapat membantu dalam membentuk kerjasama antara pihak sekolah, keluarga, dan komunitas dalam upaya bersama melindungi anak-anak dari potensi bahaya tersebut. Dalam konteks penanganan kasus, Dinas Sosial berperan sebagai mediator dan pendukung bagi korban pelecehan seksual dan keluarganya. Mereka dapat memberikan bantuan psikososial, memberi informasi tentang hak-hak korban, dan memfasilitasi proses pengaduan. Selain itu, Dinas Sosial juga dapat berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum dan organisasi terkait untuk memastikan adanya respons yang cepat dan tepat terhadap setiap kasus yang dilaporkan. Lebih lanjut, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk membangun jaringan kerjasama dengan lembaga pendidikan, kesehatan, dan organisasi masyarakat guna menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan anak. Mereka dapat menginisiasi program-program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan masalah pelecehan seksual, baik di tingkat individu maupun kolektif”

Berdasarkan dukungan yang diberikan oleh informan 2, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial memegang peran kunci dalam upaya menyosialisasikan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur di Kota Gunungsitoli. Dinas Sosial bertanggung jawab sebagai agen perubahan dengan memberikan informasi akurat dan mendalam mengenai risiko pelecehan seksual terhadap anak-anak. Melalui kegiatan penyuluhan, Dinas Sosial mampu menggerakkan inisiatif untuk memberdayakan masyarakat dalam mengidentifikasi perilaku pelecehan seksual dan memahami konsekuensinya. Mereka juga berperan dalam membentuk kerjasama antara pihak sekolah, keluarga, dan komunitas untuk bersama-sama melindungi anak-anak dari potensi bahaya tersebut. Dalam konteks penanganan kasus, Dinas Sosial berfungsi sebagai mediator dan pendukung bagi korban pelecehan seksual dan keluarganya. Mereka memberikan bantuan psikososial, memberi informasi tentang hak-hak korban, dan memfasilitasi proses pengaduan. Selain itu, Dinas Sosial berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum dan organisasi terkait untuk memastikan adanya respons yang cepat dan tepat terhadap setiap kasus yang dilaporkan. Lebih lanjut, Dinas Sosial memiliki tanggung

jawab untuk membangun jaringan kerjasama dengan lembaga pendidikan, kesehatan, dan organisasi masyarakat guna menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan anak. Mereka dapat menginisiasi program-program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan masalah pelecehan seksual, baik di tingkat individu maupun kolektif. Secara keseluruhan, peran Dinas Sosial sangat penting dalam mengatasi dan mencegah kasus pelecehan seksual pada anak di Kota Gunungsitoli. Begitu juga dengan informan 3 mengatakan bahwa:

“Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk menyosialisasikan program pencegahan pelecehan seksual kepada masyarakat Kota Gunungsitoli. Mengadakan kegiatan penyuluhan, seminar, dan lokakarya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk orang tua, guru, dan pemuda, tentang bahaya pelecehan seksual dan cara mencegahnya”

Informan 3 menekankan peran penting Dinas Sosial dalam menyosialisasikan program pencegahan pelecehan seksual kepada masyarakat Kota Gunungsitoli. Menurutnya, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk mengadakan kegiatan penyuluhan, seminar, dan lokakarya sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pelecehan seksual dan cara mencegahnya. Pentingnya melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua, guru, dan pemuda, dalam kegiatan sosialisasi tersebut juga menjadi fokus pernyataan informan 3. Hal ini menunjukkan kesadaran akan perlunya pendekatan holistik dalam upaya pencegahan pelecehan seksual, melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung. Dengan demikian, informan 3 secara tegas mendukung inisiatif Dinas Sosial untuk menjadi motor penggerak dalam menyosialisasikan program pencegahan pelecehan seksual dan menekankan pentingnya kegiatan penyuluhan, seminar, dan lokakarya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu tersebut.

4. Untuk mengetahui program dari Dinas Sosial dalam melakukan tindakan pencegahan maupun penanganan kasus pelecehan seksual pada wilayah kota Gunungsitoli.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Restuieli Harefa, SST sebagai Kabid Rehabilitas dan Howu Howu SS. Zebua, SST. Sebagai Kasubbid Rehabilitas Dinas Sosial pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, peneliti bertanya kepada Restuieli Harefa, SST informan 1 menyatakan bahwa:

“Dinas Sosial Kota Gunungsitoli memiliki sejumlah program yang ditujukan untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Salah satu program utamanya adalah penyuluhan dan edukasi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di sekolah-sekolah, keluarga, dan komunitas. Melalui program ini, Dinas Sosial berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko pelecehan seksual, tanda-tanda peringatan, dan langkah-langkah preventif yang dapat diambil. Dinas Sosial juga terlibat dalam kegiatan advokasi untuk mendorong implementasi kebijakan perlindungan anak di berbagai sektor. Mereka bekerja sama dengan pihak terkait, seperti lembaga pendidikan, kepolisian, dan lembaga kesehatan, untuk memastikan bahwa standar perlindungan anak di wilayah tersebut dijalankan dengan baik. Dalam penanganan kasus, Dinas Sosial turut berperan sebagai lembaga pendamping bagi korban pelecehan seksual dan keluarganya. Mereka menyediakan layanan dukungan psikososial, memberikan informasi terkait hak-hak korban, dan membantu dalam proses pengaduan. Kerjasama dengan lembaga penegak hukum menjadi fokus, di mana Dinas Sosial berperan sebagai perantara untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam menangani setiap kasus yang dilaporkan. Selain itu, Dinas Sosial juga mungkin menginisiasi program rehabilitasi untuk korban pelecehan seksual, baik dalam bentuk dukungan psikologis maupun pengembangan keterampilan yang dapat membantu mereka mengatasi dampak traumatis yang mungkin timbul. Keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan sosialisasi, advokasi, pendampingan, dan rehabilitasi menjadi wujud konkret dari komitmen Dinas Sosial Kota Gunungsitoli dalam melindungi anak-anak dari ancaman pelecehan seksual di wilayah mereka.

Berdasarkan pernyataan informan 1, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Gunungsitoli memiliki serangkaian program yang bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanganan kasus

pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Program utama melibatkan penyuluhan dan edukasi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di sekolah-sekolah, keluarga, dan komunitas, dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko pelecehan seksual, tanda-tanda peringatan, dan langkah-langkah preventif. Dinas Sosial juga terlibat dalam kegiatan advokasi untuk mendorong implementasi kebijakan perlindungan anak di berbagai sektor. Mereka bekerja sama dengan pihak terkait, seperti lembaga pendidikan, kepolisian, dan lembaga kesehatan, untuk memastikan bahwa standar perlindungan anak di wilayah tersebut dijalankan dengan baik. Dalam penanganan kasus, Dinas Sosial berperan sebagai lembaga pendamping bagi korban pelecehan seksual dan keluarganya. Mereka menyediakan layanan dukungan psikososial, memberikan informasi terkait hak-hak korban, dan membantu dalam proses pengaduan. Dinas Sosial juga menjadi perantara dengan lembaga penegak hukum untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam menangani setiap kasus yang dilaporkan. Selain itu, Dinas Sosial mungkin menginisiasi program rehabilitasi untuk korban pelecehan seksual, baik dalam bentuk dukungan psikologis maupun pengembangan keterampilan yang dapat membantu mereka mengatasi dampak traumatis yang mungkin timbul. Keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan sosialisasi, advokasi, pendampingan, dan rehabilitasi mencerminkan komitmen Dinas Sosial Kota Gunungsitoli dalam melindungi anak-anak dari ancaman pelecehan seksual di wilayah mereka. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, peneliti bertanya kepada Bapak Howu Howu SS. Zebua, SST, informan 2 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Dinas Sosial di Kota Gunungsitoli mengeksekusi berbagai program pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Salah satu program utama adalah penyuluhan yang diselenggarakan secara reguler di berbagai tempat, seperti sekolah, pusat komunitas, dan acara publik. Melalui penyuluhan ini, Dinas Sosial berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pelecehan seksual, tanda-tanda yang perlu diawasi,

dan cara melaporkan kasus yang dicurigai. Dinas Sosial juga aktif berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan kesehatan untuk mengintegrasikan materi perlindungan anak ke dalam kurikulum dan layanan kesehatan masyarakat. Upaya ini bertujuan agar anak-anak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak mereka dan risiko pelecehan seksual. Dalam penanganan kasus, Dinas Sosial memberikan dukungan kepada korban dan keluarganya. Mereka menjadi perantara antara korban dengan lembaga penegak hukum, menyediakan bantuan psikososial, dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan kebutuhan korban. Selain itu, Dinas Sosial juga berupaya menciptakan lingkungan rehabilitatif untuk membantu korban pulih dari dampak traumatis pelecehan seksual. Kerjasama dengan organisasi non-pemerintah dan jaringan komunitas lokal menjadi aspek penting dari program Dinas Sosial. Hal ini bertujuan untuk memperluas jangkauan program, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menciptakan sinergi dalam melindungi anak-anak dari ancaman pelecehan seksual di wilayah Kota Gunungsitoli”

Berdasarkan dukungan yang diberikan oleh informan 2, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial di Kota Gunungsitoli melaksanakan berbagai program pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Salah satu program utama adalah penyuluhan yang diselenggarakan secara reguler di berbagai tempat, seperti sekolah, pusat komunitas, dan acara publik. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pelecehan seksual, tanda-tanda yang perlu diawasi, dan cara melaporkan kasus yang dicurigai. Dinas Sosial juga aktif berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan kesehatan untuk mengintegrasikan materi perlindungan anak ke dalam kurikulum dan layanan kesehatan masyarakat. Upaya ini dilakukan agar anak-anak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak mereka dan risiko pelecehan seksual. Dalam penanganan kasus, Dinas Sosial memberikan dukungan kepada korban dan keluarganya. Mereka berperan sebagai perantara antara korban dengan lembaga penegak hukum, menyediakan bantuan psikososial, dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan kebutuhan korban. Selain itu, Dinas Sosial juga berusaha menciptakan lingkungan rehabilitatif untuk membantu korban pulih dari dampak traumatis pelecehan seksual. Kerjasama dengan

organisasi non-pemerintah dan jaringan komunitas lokal menjadi aspek penting dari program Dinas Sosial. Hal ini bertujuan untuk memperluas jangkauan program, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menciptakan sinergi dalam melindungi anak-anak dari ancaman pelecehan seksual di wilayah Kota Gunungsitoli. Secara keseluruhan, Dinas Sosial menunjukkan komitmen nyata dalam menjalankan peran preventif dan responsif terhadap pelecehan seksual pada anak di wilayah tersebut. Begitu juga dengan in forman 3 mengatakan bahwa”

“Mengadakan kampanye sosialisasi di sekolah, masyarakat, dan tempat-tempat umum untuk meningkatkan kesadaran mengenai pelecehan seksual. Memberikan informasi mengenai tanda-tanda pelecehan seksual, cara melaporkan, dan upaya pencegahan”

4.3 Pembahasan

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Restuieli Harefa, SST dan Howu Howu SS. Zebua, SST dari Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, terlihat bahwa Dinas Sosial memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur di wilayah tersebut. Beberapa poin penting yang dapat dibahas dari wawancara tersebut adalah:

- 1) Peran Sentral dalam Sosialisasi

Dinas Sosial memiliki peran sentral dalam menyosialisasikan informasi mengenai risiko pelecehan seksual pada anak di bawah umur kepada masyarakat setempat. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tanda-tanda pelecehan seksual dan bagaimana melibatkan diri dalam upaya pencegahan.

- 2) Kolaborasi dengan Lembaga Lain

Dinas Sosial bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk menyampaikan informasi secara efektif melalui program-program edukasi dan sosialisasi di tingkat komunitas. Kolaborasi dengan lembaga penegak

hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, juga merupakan bagian dari upaya penanganan kasus untuk memastikan keadilan bagi korban.

3) Pemahaman Mendalam Melalui Edukasi

Dinas Sosial melakukan upaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada orangtua, guru, dan pihak-pihak terkait lainnya melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, seminar, dan lokakarya. Tujuannya adalah memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada para pemangku kepentingan agar dapat mengidentifikasi potensi tanda-tanda pelecehan seksual pada anak dan meresponnya dengan tepat.

4) Penanganan Kasus dan Dukungan Korban

Dinas Sosial memiliki tanggung jawab dalam membantu korban, termasuk menyediakan layanan psikososial dan konseling. Kolaborasi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan lembaga kesehatan dilakukan untuk menyediakan bantuan kepada korban secara emosional dan praktis, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Penerapan Kebijakan Perlindungan Anak

Dinas Sosial berperan aktif dalam memastikan penerapan kebijakan perlindungan anak di berbagai institusi, termasuk sekolah dan lembaga perawatan anak. Monitoring dan evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan implementasi yang efektif dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

Pembahasan ini menggambarkan bahwa Dinas Sosial tidak hanya aktif dalam menyosialisasikan informasi pencegahan pelecehan seksual pada anak, tetapi juga berperan dalam penanganan kasus dan memberikan dukungan kepada korban. Kolaborasi dengan berbagai lembaga menjadi kunci untuk mencapai hasil yang optimal dalam melindungi anak-anak dari pelecehan seksual di wilayah tersebut.

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Restuieli Harefa, SST, dan Howu Howu SS. Zebua, SST dari Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, terlihat bahwa Dinas Sosial telah melaksanakan program-program holistik untuk tindakan

pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual di wilayah tersebut. Beberapa poin kunci yang dapat dibahas dari wawancara tersebut adalah:

1) Program Pencegahan

Dinas Sosial mengadakan kampanye penyuluhan melalui seminar, workshop, dan kegiatan komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko pelecehan seksual pada anak-anak. Kolaborasi dengan sekolah dan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan pendekatan pencegahan ke dalam kurikulum pendidikan, termasuk pelatihan bagi guru dan staf sekolah.

2) Penanganan Kasus

Dinas Sosial bekerja sama erat dengan lembaga penegak hukum, terutama kepolisian, untuk memberikan pendampingan dan dukungan kepada korban pelecehan seksual. Layanan konseling dan rehabilitasi disediakan untuk membantu korban dalam pemulihan psikologis mereka.

3) Pusat Krisis dan Sumber Daya

Dinas Sosial dapat mendirikan pusat krisis atau tempat aman bagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual, menyediakan layanan medis, psikososial, dan hukum. Pusat sumber daya berfungsi sebagai titik pusat bagi pencegahan, identifikasi, dan penanganan kasus pelecehan seksual, memberikan informasi, dukungan, dan bantuan kepada keluarga dan komunitas.

4) Kolaborasi dengan Pihak Eksternal

Program-program ini dijalankan melalui kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah, lembaga kesehatan, dan lembaga pendidikan. Kerjasama dengan kelompok advokasi yang memiliki kepentingan serupa memperkuat upaya bersama dalam melindungi anak-anak dan merespons secara efektif terhadap kasus-kasus pelecehan seksual.

5) Monitoring dan Evaluasi

Dinas Sosial melakukan pemantauan terus-menerus terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak di berbagai sektor, termasuk di lingkungan keluarga dan masyarakat. Upaya ini bertujuan

untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak di Kota Gunungsitoli serta memberikan respons yang efektif terhadap kasus-kasus pelecehan seksual.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial tidak hanya fokus pada upaya pencegahan, tetapi juga memiliki strategi yang terkoordinasi untuk menangani kasus pelecehan seksual secara holistik. Kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal dan upaya monitoring yang terus-menerus menjadi bagian integral dari pendekatan mereka untuk melindungi anak-anak di Kota Gunungsitoli.

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan Restuieli Harefa, SST, dan Howu Howu SS. Zebua, SST dari Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, terlihat bahwa peran Dinas Sosial dalam menyosialisasikan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur di wilayah tersebut sangat krusial. Beberapa poin kunci yang dapat dibahas dari wawancara tersebut adalah:

- 1) Edukasi dan Penyuluhan

Dinas Sosial memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak, mengidentifikasi tanda-tanda pelecehan seksual, dan melaporkan kejadian tersebut. Kolaborasi dengan sekolah, komunitas, dan organisasi non-pemerintah digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pelecehan seksual pada anak-anak.

- 2) Penanganan Kasus

Dinas Sosial berperan sebagai mediator antara korban, keluarga, dan lembaga penegak hukum. Mereka memberikan dukungan psikososial kepada korban dan keluarganya serta membantu dalam proses pengaduan dan penyelidikan. Koordinasi dengan lembaga penegak hukum dan organisasi terkait dilakukan untuk memastikan respons yang cepat dan tepat terhadap setiap kasus yang dilaporkan.

- 3) Rehabilitasi dan Koordinasi

Dinas Sosial mengoordinasikan upaya rehabilitasi bagi korban pelecehan seksual agar mereka dapat pulih secara fisik dan psikologis.

Tanggung jawab mereka melibatkan memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak di wilayah tersebut diimplementasikan dengan baik, melalui kerjasama dengan pihak terkait seperti kepolisian, instansi pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan.

4) Jaringan Kerjasama

Dinas Sosial berperan dalam membangun jaringan kerjasama dengan lembaga pendidikan, kesehatan, dan organisasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan anak. Inisiasi program-program pendidikan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan masalah pelecehan seksual, baik di tingkat individu maupun kolektif.

Dalam keseluruhan, peran Dinas Sosial tidak hanya terbatas pada sosialisasi dan edukasi, tetapi juga mencakup aspek penanganan kasus, rehabilitasi, dan pembangunan kerjasama lintas sektor. Dinas Sosial memegang peran kunci sebagai agen perubahan, memberikan informasi akurat, dan berperan aktif dalam membentuk kerjasama untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya pelecehan seksual. Kesadaran dan langkah-langkah preventif yang diambil oleh Dinas Sosial di Kota Gunungsitoli menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak.

4. Berdasarkan wawancara dengan Restuieli Harefa, SST, dan Howu Howu SS. Zebua, SST dari Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial memiliki peran yang sangat krusial dalam pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1) Program Pencegahan

Dinas Sosial Kota Gunungsitoli memiliki sejumlah program pencegahan, dengan fokus utama pada penyuluhan dan edukasi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di sekolah-sekolah, keluarga, dan komunitas. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko pelecehan seksual, tanda-tanda peringatan, dan langkah-langkah preventif yang dapat diambil.

2) Advokasi dan Keterlibatan Lembaga Terkait

Dinas Sosial aktif terlibat dalam kegiatan advokasi untuk mendorong implementasi kebijakan perlindungan anak di berbagai sektor. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan, kepolisian, dan lembaga kesehatan dilakukan untuk memastikan standar perlindungan anak di wilayah tersebut dijalankan dengan baik.

3) Penanganan Kasus

Dinas Sosial berperan sebagai lembaga pendamping bagi korban pelecehan seksual dan keluarganya, menyediakan dukungan psikososial, memberikan informasi terkait hak-hak korban, dan membantu dalam proses pengaduan. Mereka menjadi perantara antara korban dengan lembaga penegak hukum, memastikan koordinasi yang efektif dalam menangani setiap kasus yang dilaporkan.

4) Rehabilitasi dan Kolaborasi Komunitas

Program rehabilitasi mungkin diinisiasi untuk membantu korban pelecehan seksual pulih dari dampak traumatis, baik dalam bentuk dukungan psikologis maupun pengembangan keterampilan. Keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan sosialisasi, advokasi, pendampingan, dan rehabilitasi mencerminkan komitmen Dinas Sosial dalam melindungi anak-anak dari ancaman pelecehan seksual di wilayah mereka.

5) Jaringan Komunitas:

Dinas Sosial bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan jaringan komunitas lokal untuk memperluas jangkauan program, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menciptakan sinergi dalam melindungi anak-anak.

Secara keseluruhan, Dinas Sosial Kota Gunungsitoli menunjukkan dedikasi dan komitmen dalam menjalankan peran preventif dan responsif terhadap pelecehan seksual pada anak-anak di wilayah mereka. Program yang holistik, mencakup pendidikan, penanganan kasus, rehabilitasi, dan kolaborasi dengan komunitas, menjadi landasan kuat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak.